

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Kabupaten Jombang terletak pada koridor bagian tengah wilayah Provinsi Jawa Timur, yakni antara 112 0 03' sampai dengan 112 0 27' Bujur Timur dan 07 0 20' sampai dengan 07 0 46' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.159,50 km², memiliki letak yang sangat strategis, karena berada pada perlintasan jalan arteri primer Surabaya-Solo-Jakarta dan jalan kolektor primer Malang- Jombang-Babat. Selain itu, Kabupaten Jombang juga dilintasi ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono, yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Jawa (Anonim, RPJMD Kabupaten Jombang, Gambaran Umum Jombang, 2018).

Secara administratif Kabupaten Jombang terbagi ke dalam 21 (dua puluh satu) kecamatan yang terbagi menjadi 302 desa dan 4 Kelurahan, dimana wilayah Kecamatan Wonosalam merupakan kecamatan dengan wilayah terluas dengan luas wilayah 121,63 km² atau sekitar 10,49 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jombang, diikuti dengan Kecamatan Plandaan dengan luas wilayah 120,40 km² atau sekitar 10,38 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jombang. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil adalah kecamatan Ploso dengan luas wilayah 25,96 km² atau sekitar 2,24 persen dari seluruh luas wilayah Kabupaten Jombang (Anonim, RPJMD Kabupaten Jombang, Gambaran Umum Jombang, 2018).

Berdasarkan data registrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 berjumlah 1.253.078 jiwa. Kondisi ini menunjukkan peningkatan sebesar 0,46 persen, atau sebanyak 5775 jiwa, jika dibandingkan dengan hasil perhitungan jumlah penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2016 yang tercatat berjumlah 1.247.303 jiwa. Angka kepadatan penduduk Kabupaten Jombang pada tahun 2017 sebesar ± 1.081 jiwa/km², angka ini meningkat jika dibandingkan kepadatan penduduk tahun 2016 sebesar ± 1.076 jiwa/km². (Anonim, RPJMD Kab. Jombang, Gambaran umum Jombang, 2018).

Kabupaten jombang dilihat dari segi geografis sangatlah menguntungkan dan mampu menunjang pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Bisa dikatakan begitu karena memiliki beberapa keuntungan diantaranya, dilewati ruas jalan trans nasional 1 dan tol trans jawa serta poros perjalanan alternatif Jombang Malang dan Jombang Babat Lamongan Tuban serta jombang Kediri Tulungagung (Anonim, RPJMD Kabupaten Jombang, Geografi Jombang, 2018). Dengan dilewatinya jalur perjalanan tersebut jombang diuntungkan dengan dapat membuat jalur distribusi barang dengan poros produksi dan redistribusi di kabupaten Jombang itu sendiri. Keuntungan lainnya adalah wilayah geografis kabupaten jombang yang berbatasan dengan Kabupaten Malang dan Kabupaten Kediri di bagian selatan (Pegunungan Anjasmoro dan Taman Hutan Raya R. Soerjo) dan perbukitan kendeng di sebelah utara (RPJMD Kabupaten Jombang, Geografi Jombang, 2018). Memungkinkan sekali menjadi poros produksi hasil hutan dan hasil kebun karena

kontur wilayah tersebut merupakan dominan dataran tinggi dan perbukitan. Serta keuntungan yang menjadi tumpuan utama dominasi dataran rendah dalam bentuk area persawahan yang mampu memaksimalkan pemasukan daerah dari sektor pertanian.

Dilihat dari segi sosial budaya kabupaten Jombang cukup menarik dan mampu menjadi sorotan lembaga pemerintahan dalam mengolahnya agar menjadi salah satu alternatif pemasukan daerah melalui pendapatan asli daerah. Kata Jombang sendiri berasal dari bahasa jawa yaitu *ijo* berarti hijau yang mewakili kaum agamis atau santri dan *abang* berarti merah yang mewakili kaum *kejawen* atau nasionalis (Ojung, Sasana Budaya Jombang, 2010). Dari kultur bahasa itulah membentuk asimilasi budaya yang indah yakni budaya keislaman berpadu dengan jawa majapahit. Banyak sekali peninggalan sejarah yang ada di kabupaten Jombang baik berbau budaya jawa majapahit maupun islam, karena secara geografis Jombang merupakan pintu masuk kerajaan majapahit tempo dulu dan Jombang pula daerah lahirnya golongan islam yang sudah tua dan melegenda yaitu Nahdlatul ulama'. Contoh salah satu tradisi yang lahir karena asimilasi budaya tersebut adalah kenduri durian Wonosalam yang mana memadukan cirikhas kenduri dari kaum kejawen majapahit serta tasyakuran akbar yang merupakan budaya islam dengan mempersembahkan hasil alam berupa durian sebagai ucapan terimakasih terhadap sang hyang agung yaitu Tuhan Yang Maha Esa (Ojung, Sasana Budaya Jombang, 2010). Dilain sisi Jombang sendiri mendapat perhagaan internasional dari ASEAN sebagai kota dengan tingkat toleransi tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan *pluralime* budaya dan agama yang ada (JawaPos Media). Serta banyak sekali objek

wisata berbasis budaya lokal daerah yang dikembangkan diantaranya Museum Islam Nusantara, Gereja Kristen Jawi Wetan (GKJW), Ojung, Ludruk Remo Boletan, Besut dan banyak lagi festival budaya khas lainnya.

Dilihat dari segi Kependudukan dan demografi, kabupaten Jombang mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya yang rata-rata tingkat kenaikan antara 0,30 sampai 0,50 persen (Badan Pusat Statistika Kabupaten Jombang, 2018). Dalam hal ini kabupaten Jombang sama dengan kabupaten maupun kota lainnya di Indonesia yang akan mendapatkan bonus demografi yang nantinya akan sangat membantu pertumbuhan Negara dalam menyongsong Indonesia emas 2045. Asalkan diimbangi dengan pengawasan dan pendampingan guna mencapai target SDM (Sumber Daya Manusia) unggul. Dalam mencapai SDM unggul perlu adanya peningkatan mutu pendidikan dan juga kesehatan yang optimal agar nantinya SDM berkualitas dapat tercapai. Pendidikan di kabupaten Jombang belumlah merata dari segi kualitasnya, masih banyak sekolah terbelakang dari segi infrastuktur dan tenaga pengajar khususnya di wilayah terpencil. Begitu juga alat penunjang atau sarana dan prasarana kesehatan yang ada di kabupaten Jombang yang belum maksimal dan merata, pusat kesehatan masih tertuju di 2 rumah sakit besar yakni RSUD Kabupaten Jombang dan RSK Mojowarno. Namun bisa dikatakan tingkat UHH (Usia Harapan Hidup) dan tingkat AKB (Angka Kematian Bayi) serta AKI (Angka Kematian Ibu) masih sangat wajar apabila dibandingkan dengan kota kabupaten di wilayah Jawa Timur lainnya. Yang mana Kabupaten Jombang masih sangatlah dekat dengan presentase UHH Provinsi Jawa Timur yaitu dikisaran 66

sampai dengan 70 persen (BPS Jawa Timur) begitu pula dengan AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi).

Menyorot dari ruang gerak pemerintah kabupaten Jombang dalam memberikan regulasi dan kebijakan publik berdasar pada aturan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Hanif Nurcholis, 2007:30). Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Jombang yang mandiri dalam mengurus dan mengembangkan progress daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seiring dengan diterapkannya otonomi daerah maka dalam prakteknya diberlakukan pula istilah pemberlakuan ekonomi daerah. Maksud diadakannya pemberlakuan ekonomi daerah ini adalah bertujuan untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah guna menunjang kemandirian daerah dalam pemenuhan kebutuhan daerah itu sendiri. Sesuai dengan asumsi Lincoln Arsyad (2010:374) Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan

kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Bisa disimpulkan bahwa pemberlakuan ekonomi daerah adalah upaya pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi yang sudah tertuang dalam prinsip-prinsip otonomi daerah.

Akibat dari pemberlakuan ekonomi daerah maka akan diiringi pula dengan tumbuh serahnya pertumbuhan ekonomi. pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat Sukirno (2011:331). Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat.

Apabila diambil dalam makna lebih sempit lagi dalam skala wilayah maka akan mengerucut pada pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan volume variabel ekonomi dari suatu sub sistem spasial suatu wilayah atau daerah dan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemakmuran suatu daerah. Pertumbuhan yang terjadi dapat ditinjau dari peningkatan produksi sejumlah

komoditas yang diperoleh suatu daerah. Lebih sederhananya lagi adalah penambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut.

Dari indikasi pertumbuhan ekonomi daerah yang maksimal merupakan salah poin daerah mencapai keberhasilan pembangunan daerah. Menurut Tjokroamidjojo (dalam Syafalevi,2011:28) perencanaan pembangunan daerah dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam cakupan wilayah tertentu. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu kiat dalam mencapai kualitas daerah.

Pemerintah kabupaten Jombang dalam mencapai keberhasilan pembangunan daerah melalui perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada kebijakan kebijakan yang mendorong kualitas daerah kabupaten Jombang. Kebijakan pemerintah kabupaten Jombang didasarkan pada misi bupati Jombang yang dikembangkan dalam peraturan dan kebijakan berlanjut dan disesuaikan dengan kebutuhan tiap OPD terkait. Misi bupati kabupaten Jombang diantaranya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional. Mewujudkan Masyarakat Jombang yang Berkualitas, Religius, dan Berbudaya. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi Unggulan Lokal dan Industri. Dari misi tersebut

akan dikembangkan menjadi peraturan yang berdasar guna mencapai kualitas daerah sebagai landasan pembangunan daerah.

Dalam Mencapai kualitas daerah dalam bidang ekonomi, maka perlu diketahuinya sektor unggul dan potensial guna memperkuat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang mana sesuai dengan misi bupati kabupaten Jombang yang ke tiga. Dalam prakteknya perlu dilakukan analisis guna mengetahui sektor sektor unggul dan potensial di kabupaten Jombang.

Sektor unggul merupakan sektor yang mampu mendorong pertumbuhan atau perkembangan bagi sektor-sektor lainnya, baik sektor yang mensuplai inputnya maupun sektor yang memanfaatkan outputnya sebagai input dalam proses produksinya (Widodo, 2006 : 5). Sedangkan dalam praktek perkembangannya sektor ekonomi unggulan sebagai sektor yang dapat menunjang dan mempercepat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang berdasarkan pada kriteria tingkat kemampuan sektor dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan PDRB daerah, tingkat kemampuan menyerap tenaga kerja, potensi dalam menghasilkan komoditas ekspor dan tingkat keterkaitan yang kuat dengan sektor lainnya.

Dilihat dari berbagai macam sektor kabupaten Jombang sebenarnya memiliki banyak kelebihan dan keuntungan yang seharusnya diperoleh khususnya digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun masih banyak pula keunggulan – keunggulan yang belum terekspos dan belum dikembangkan. Berbicara tentang keunggulan yang ada, dalam analisis dan riset disebut dengan sektor unggulan. Apabila sektor unggulan sudah diterapkan dalam masing masing daerah

yang ada maka dikerucutkan dalam potensi unggul lokal daerah, yaitu sumber daya atau kekayaan daerah itu sendiri yang diolah dan di produksi oleh daerah tersebut sehingga menjadi produk unggulan daerah dengan basis komoditi lokal daerah tersebut (Widodo, 2006). Dari potensi unggul lokal daerah ini akan sangat membantu proses pertumbuhan daerah tersebut melalui surplus ekonomi daerah yang berimbas pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari berbagai sudut pandang sektor yang ada, Jombang banyak memiliki keunggulan didalamnya namun diantara sektor unggul tersebut banyak diantaranya pula yang belum termaksimalkan. Maka perlu adanya analisis permasalahan yang membahas tentang hambatan laju pertumbuhan sektor tersebut serta menyajikan solusi sekaligus asumsi penguatan sektor unggul yang ada. Asumsi yang dimaksudkan adalah dengan membuat terobosan baru guna memaksimalkan hasil sektor unggul tersebut, diantara memetakan sektor unggul yang ada, merencanakan pengembangan *maksimalisasi output*, mencari *korelasi* antar sektor unggul, merumuskan kebijakan, serta mengkolaborasikan dengan perkembangan teknologi yang berlangsung saat ini.

Terkait dengan perkembangan teknologi terkini dan keterkaitannya dengan sektor unggul daerah atau potensi unggul lokal daerah yang terfokus dalam bidang ekonomi. Saat ini Indonesia berada pada masa *Industry 4.0 goes to Industry 5.0* (IDN Times, *news* Desember 2018). Yang mana dalam *industry 4.0* adalah masa dimana tahap pengembangan sektor primer menuju sektor sekunder atau pematapan industrialisasi dengan memanfaatkan jaringan internet berbasis ekonomi aplikatif

terpadu guna efektifitas dan efisiensi proses (Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian). Sedangkan *industry 5.0* adalah maksimalisasi industri dengan memanfaatkan *robotic* dalam prosesnya (Universiti Sains Malaysia, Prof Reevany Bustami PhD). Sekalipun Indonesia masih berpacu dalam Industri 4.0 tapi sosialisasi dan pemahaman struktural industri 5.0 masih tetap dijalankan. Dalam simpulannya tiap daerah harus siap dalam memotori arah kebijakan ini dengan perencanaan dan pemetaan potensi ekonomi yang ada.

Apabila dilihat dari kebijakan industri 4.0 yang disinkronkan dengan perencanaan ekonomi dimasing-masing daerah maka muncul kebijakan yang ada, yaitu *smart city*. *Smart city* adalah wilayah yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari, dengan tujuan untuk mempertinggi efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga (Bappenas). Indikator dalam *smart city* itu sendiri adalah *smart economy, smart living, smart environment, smart mobility, smart people, smart governance* (Kajian Smart City, FE UGM). Diantara banyaknya indikator tersebut, dalam riset ini akan dibahas mengenai *smart economy* itu sendiri, yang mana *smart economy* memiliki arti inovasi dan persaingan, jika semakin banyak inovasi-inovasi baru yang dikembangkan maka akan menambah peluang usaha baru dan meningkatkan persaingan pasar usaha/modal. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut dengan memadukan

teknologi informasi dan komunikasi (Prakoso Setyo Sembodo, 2016). Sebelum diberlakukannya *smart economy* ini perlu adanya perencanaan yang matang dan dianogsa yang tepat agar mencapai hasil maksimal serta strategi yang muktahir, lebih khusus lagi sistem dan kebijakan ini akan diterapkan di kabupaten berkembang dengan berbagai macam keterbatasan yang ada yaitu kabupaten Jombang. Maka dalam riset dan penelitian ini guna prasyarat dalam meraih gelar strata satu atau sarjana jurusan ekonomi pembangunan maka diajukan judul sesuai topik pembahasan kejuruan yaitu perencanaan dan pembangunan daerah adalah

“ANALISIS SEKTOR UNGGUL DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI” (Studi Perencanaan dan Strategi *Smart Economy* di Kabupaten Jombang).

I.2 Rumusan Masalah

Dalam pemanfaatan sekaligus mengoptimalkan output dari tiap sektor penunjang ekonomi di kabupaten Jombang perlu adanya sistematisasi perencanaan dan strategi agar tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Maka dalam perencanaan perlu adanya studi prioritas atau pemetaan sektor mana yang harus dioptimal dengan dasar perhitungan dan analisa matematis.

Pemetaan sektor penunjang ekonomi digunakan untuk mengetahui sektor unggulan atau lebih dikerucutkan lagi menjadi potensi unggul lokal daerah, untuk nantinya di korelasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Jombang.

Setelah diketahui korelasi dan pengaruhnya maka bisa dibuat rencana dan strategi yang diperlukan.

Berlanjut dengan perkembangan sistem yang ada serta adaptasi terhadap kebijakan nasional yang disinkronkan terhadap tiap-tiap wilayah kabupaten kota di Indonesia. Kabupaten Jombang juga berusaha mengimbangi keadaan kebijakan yang berlaku dengan mengadopsi Industri 4.0 yang dikemas dalam bentuk perencanaan dan strategi penerapan *Smart Economy* dengan basis potensi unggul lokal daerah.

Dengan asumsi data dan deskriptif diatas serta dalam latar belakang maka bisa dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa sajakah sektor unggulan di kabupaten Jombang ?
2. Bagaimana pengaruh sektor unggulan terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Jombang ?
3. Bagaimana hubungan yang ada antar sektor unggulan kabupaten Jombang ?
4. Bagaimana perananan sektor unggul dalam bentuk perencanaan dan strategi penerapan *smart economy* di kabupaten Jombang?

I.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sektor unggul yang ada dikabupaten Jombang.
2. Untuk mengetahui pengaruh sektor unggul terhadap laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Jombang.
3. Untuk mengetahui hubungan antar sektor unggul di kabupaten Jombang.

4. Untuk mengetahui bentuk kebijakan berupa perencanaan dan strategi penerapan *smart economy* di kabupaten Jombang berbasis potensi unggul lokal daerah.

I.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat mengetahui sektor unggul, hubungan antar sektor unggul, pengaruh sektor unggul terhadap laju pertumbuhan ekonomi serta bentuk perencanaan dan strategi penerapan *smart economy* di kabupaten Jombang. Hasil penelitian diharapkan bisa menambah wawasan penelitian khususnya tentang perencanaan pembangunan daerah serta dapat digunakan pembandingan untuk penelitian selanjutnya baik dari segi tema, model, alat analisis, metode maupun hasilnya.

2. Manfaat praktisi

- a. Bagi Instansi Pemerintahan

Dapat menjadi bahan tambahan dalam proses perencanaan daerah, serta dapat pula digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pembangunan daerah khususnya di kabupaten Jombang.

- b. Bagi Akademisi Kampus

Dapat digunakan sebagai bahan penelitian lanjutan ataupun pembandingan untuk penelitian berikutnya, baik dari segi tema, model, alat analisis, metode maupun hasilnya.

- c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi daerah dan perencanaan wilayah, serta dapat pula digunakan sebagai opini terpercaya dalam memahami kondisi perekonomian.